

Analisis Komparasi Sistem Pendidikan Indonesia dan Finlandia

Sundari

Institut Agama Islam Al Qur'an Al Ittifaqiah
sundarijazirah@gmail.com

Komarudin Sassi

Institut Agama Islam Al Qur'an Al Ittifaqiah
sassikomarudin@yahoo.com

Jl.Lintas Timur, Kayuagung, Palembang, Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan

Abstract

Education currently occupies a very important position in human development. The quality of the Finnish educational system is interesting to study because its success has been recognized worldwide. This study provides an overview of the comparison of the education systems of the countries of Indonesia and Finnish. The method used in this study is literature study. The results of the study show several differences, (1) Indonesia's educational system is colored by many competitions while Finnish puts forward the principle of equality; (2) Indonesia has a system of failing a grade and student ranking, Finnish has 'nt failing a grade and ranking system; (3) Indonesia load learning every week +/- 40 hours, Finnish lessons +/- 30 hours per week; (4) Indonesia learns a lot in class, Finnish puts forward problem solving methods; (5) Indonesia assignments almost become a routine agenda every face to face, Finnish does not burden students with a lot of tasks, (6) Indonesia minimum teacher qualifications D4, Finnish minimum teacher qualifications S2 (Master), (7) Indonesian qualifications students enter basic education for at least 6 years (5.5 years accompanied by written recommendations from professional psychologists), Finnish qualifications for students entering basic education for at least 7 years.

Keywords: Educational System, Comparative Analysis, Indonesia, Finnish, Educational Quality

Abstrak

Di era milenial seperti saat ini pendidikan menempati posisi yang sangat penting dalam perkembangan manusia. Kualitas sistem pendidikan Finlandia menarik menjadi kajian karena keberhasilannya telah diakui dunia. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai perbandingan sistem pendidikan negara Indonesia dan Finlandia. Kajian kepustakaan adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil telaah menunjukkan beberapa perbedaan yakni (1) Indonesia sistem pendidikan diwarnai banyak kompetisi sedangkan Finlandia mengedepankan prinsip kesetaraan; (2) Indonesia ada sistem tinggal kelas dan perangkingan siswa, Finlandia tidak ada sistem tinggal kelas dan perangkingan; (3) Indonesia beban belajar setiap minggu +/- 40 jam, Finlandia jam pelajaran +/- 30 jam per minggu; (4) Indonesia pembelajaran banyak dikelas, Finlandia mengedepankan metode problem solving; (5) Indonesia pemberian tugas hampir menjadi agenda rutin setiap tatap muka, Finlandia tidak membebani peserta didik dengan tugas yang banyak, (6) Indonesia kualifikasi Guru minimal D4, Finlandia kualifikasi guru minimal S2 (Master), (7)

Received November 17, 2023; Accepted Desember 27, 2023; Published Januari 29, 2024

* Sundari, sundarijazirah@gmail.com

Indonesia kualifikasi peserta didik memasuki pendidikan dasar minimal 6 tahun (5,5 tahun disertai rekomendasi tertulis dari psikolog profesional), Finlandia kualifikasi peserta didik memasuki pendidikan dasar minimal 7 tahun.

Kata Kunci: Sistem Pendidikan, Analisis Komparasi, Indonesia, Finlandia, Mutu Pendidikan.

Pendahuluan

Indonesia pada masa sekarang ini dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negara itu sendiri. Permasalahan tersebut terjadi sebagai akibat dari banyaknya perubahan-perubahan yang mendunia, contohnya adalah kemajuan IPTEK, pergeseran nilai sosial dan kebudayaan pada masyarakat. Pendidikan sebagai lembaga yang dinamis juga merasakan pengaruh atas perubahan tersebut. Perubahan budaya yang membawa dampak terhadap kemajuan dan perkembangan pendidikan. Pendidikan dibutuhkan manusia untuk berkembang. Manusia yang berkualitas dan mampu bersaing dapat diciptakan melalui pendidikan yang baik. Kualitas pembelajaran yang masih jauh dari di bawah kata sempurna menjadikan usaha pembangunan sumber daya manusia berjalan dengan lambat (Charron et al., 2013). Kualitas pendidikan di Indonesia diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan zaman.

Di era milenial seperti saat ini pendidikan menempati posisi yang sangat penting dalam perkembangan manusia (Sarica & Cavus, 2009). Tuntutan pekerjaan, hobi, bahkan gaya hidup mendorong sebagian besar orang untuk selalu belajar dalam setiap kondisi kehidupannya. Negara Republik Indonesia memiliki sebuah sistem pendidikan yang telah dikembangkan sejak tahun 1947 melalui kurikulum yang pertama kali diterapkan yaitu rencana pelajaran 1947. Perkembangan zaman memberikan peluang bagi para pakar pendidikan untuk menyusun sebuah sistem pendidikan yang sesuai dan dapat menjiwai semangat Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Membangun sebuah sistem pendidikan tentunya membutuhkan banyak pertimbangan dari berbagai aspek dan komponen yang terkandung dalam masyarakat. Hubungan yang terjalin dalam setiap komponen tersebut didasarkan pada sebuah tujuan yang telah direncanakan.

Studi komparasi adalah disiplin ilmu yang mempelajari sistem-sistem pendidikan baik dalam satu negara, maupun antar negara (Pfeffer, 2015; Reynolds et al., 2015). Aneka inovasi

pendidikan baik melalui menggali sumber-sumber kreatif dari dalam negeri maupun melalui analisis komparasi pendidikan negara lain yang dianggap berhasil dalam mengembangkan kualitas pendidikan. Melalui analisis komparasi pendidikan, kita dapat mengetahui bagaimana negara lain merencanakan pengembangan dan peningkatan sistem pendidikannya yang dapat ditiru, maka pendidikan komparatif berusaha memberikan kontribusi dan rekomendasi kepada pengambilan kebijakan dalam rangka membangun dan memajukan sistem pendidikan.

Finlandia dalam beberapa dekade terakhir mentransformasi sistem pendidikan di negaranya menjadi yang terbaik diseluruh dunia. Hal tersebut mengacu pada hasil tes yang diselenggarakan OECD (Organization for Economic Cooperation & Development) pada tahun 2015 yakni tes PISA (Programme for International Student Assessment) negara Finlandia ada di jajaran negara teratas dengan kualitas pendidikan terbaik dilihat dari science, reading , dan mathematics. Pada tes ini Indonesia berada pada jajaran negara dengan kualitas pendidikan terendah (OECD, 2015).

Perjalanan panjang sejarah sistem pendidikan Indonesia telah dibuktikan dengan terjadinya pergantian kurikulum pendidikan Nasional. Dalam rentang waktu 71 tahun semenjak tahun 1947 Indonesia terhitung 10 kali melakukan pergantian. Pergantian ini tentunya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan setiap generasi. Kondisi pendidikan seperti ini tentunya menjadi sebuah catatan besar bagi semua elemen bangsa untuk dapat menemukan formulasi yang tepat dan sesuai karakter anak bangsa. Keadaan berbeda terjadi pada sistem pendidikan Finlandia yang berhasil menempati posisi pertama sebagai sistem pendidikan terbaik di dunia. Negara Finlandia menunjukkan bahwa pendidikan yang berlandaskan kesetaraan, tanggung jawab, berbudaya serta kerjasama mampu memberikan hasil yang sangat memuaskan (Putra, 2015). Keberhasilan negara Finlandia tentunya dapat menjadi sebuah rujukan negara Indonesia untuk menjawab pertanyaan bagaimana mengembangkan sistem pendidikan yang baik. Kajian kepustakaan adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini.

Kajian kepustakaan mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan dan mengumpulkan segala informasi yang relevan dengan masalah yang dikaji (Ulfatin, 2015). Metode pengumpulan data-data serta sumber-sumber

yang berhubungan dengan topik penelitian disebut juga kajian kepustakaan. Kajian pustaka bisa diambil dari berbagai sumber yakni majalah, surat kabar, internet, jurnal, buku dokumentasi, dan pustaka. Analisis komparasi pendidikan yang dilakukan menggunakan studi kepustakaan dalam menggali topik-topik yang dibahas.

Hasil Dan Pembahasan

1) Prinsip-prinsip Sistem Pendidikan di Indonesia

Indonesia telah mengatur semua bentuk aktivitas pendidikan nasional melalui peraturan perundang-undangan. UUD 1945 dalam alinea ke 4 mengamanahkan agar pendidikan Indonesia harus mampu memberikan pelayanan terbaik bagi anak bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara terperinci UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menjabarkan secara rapi serta sistematis mengenai sistem pendidikan Indonesia. Penjabaran mengenai prinsip-prinsip pendidikan di Indonesia tertuang dalam pasal 4 ayat 1 hingga 6. Dalam penelitian Ristianti (2019) menyebutkan bahwa pendidikan di Indonesia sedang berkembang dari era revolusi industri 4.0 menjadi social education 5.0 didalamnya mengisyaratkan agar penerapan pendidikan harus dilakukan dengan demokratis serta berkeadilan dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, serta kemajemukan bangsa (Parker & Raihani, 2011). Selanjutnya UU SISDIKNAS pasal 5 ayat 1 mengamanatkan bahwa semua orang memiliki hak untuk mengenyam pendidikan yang berkualitas baik. Amanah tersebut sepertinya sangat bertentangan dengan amanah undangundang SISDIKNAS pasal 5 ayat 2 hingga 4, yang menyatakan bahwa hanya warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial atau tinggal didaerah terpencil atau terkebelakang, masyarakat adat yang terpencil, serta warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan (2003). Sistem pendidikan saat ini seolah-olah merupakan salah satu bentuk dari amanah pasal tersebut, dimana lembaga pendidikan nasional begitu antusias untuk melakukan kompetisi. Pemilahan siswa yang memiliki potensi dan kecerdasan diatas rata-rata dengan siswa yang memiliki potensi kecerdasan dibawah rata-rata menjadi salah satu bukti yang tersirat.

2) Prinsip-prinsip Sistem Pendidikan di Finlandia

Faktor yang menjadi kunci dalam pembangunan ekonomi dan peradaban modern di Finlandia adalah pendidikan hal ini disebutkan, secara tegas dalam visinya oleh kementerian

pendidikan Finlandia (Finland, 2015). Kesetaraan pendidikan dan budaya merupakan target strategis yang sangat penting yang ingin diraih oleh pemerintahan Finlandia hal ini tertuang dalam strategi kementerian pendidikan finlandia tahun 2015. Pemerintah Finlandia menjamin kesejahteraan intelektual, fisik dan ekonomi melalui akses pendidikan seluasluasnya bagi warga negaranya.

Prinsip kompetisi atau persaingan tidak diterima di negara ini, pasalnya publik Finlandia berpegang teguh pada keyakinan prinsip keadilan (equity). Warga negara Finlandia menjunjung tinggi prinsip kesetaraan (equality) dan keadilan (equity) serta bertolak belakang atau tidak menyetujui pengelolaan sekolah berorientasi pasar atau kompetisi (Putra, 2015). Publik atau masyarakat Finlandia mempunyai kekhawatiran atas kesempatan mendapatkan pendidikan. Akses terhadap pendidikan yang sama menjadi prinsip dari pembuatan regulasi di bidang pendidikan. Kebijakan tersebut kemudian mengarah pada suatu keunggulan yang akan memberikan standar pendidikan yang sama terhadap warga negaranya yang diperoleh secara gratis.

Membangun kepercayaan dan tanggung jawab dalam setiap bentuk interaksi dikedepankan oleh publik Finlandia (Putra, 2015). Pengelolaan sistem pendidikan dikembangkan dengan mengedepankan nilai kepercayaan dan tanggung jawab. Guru dan kepala sekolah bersama orang tua dan komunitas yang ada disekolah diyakini mengetahui apa yang harus diberikan dan disiapkan dengan maksimal untuk peserta didik, hal ini ditanamkan oleh otoritas pendidikan di Finlandia dengan menumbuhkan budaya percaya dalam mengelola pendidikan. Budaya percaya juga ditunjang dengan nilai-nilai profesionalisme, percaya diri, kejujuran dan tanggung jawab. Budaya percaya di Finlandia diperkuat dengan adanya nilai kerjasama dan kolaborasi (Putra, 2015). Upaya untuk menyiapkan perekonomian yang mampu bersaing ditaraf internasional adalah peserta didik dan lembaga pendidikan mengurangi cara belajar dengan konsep bersaing baik antar siswa maupun antar sekolah. Finlandia memiliki pandangan sendiri dalam menghadapi persaingan global, sebaliknya, sekolah harus meningkatkan kolaborasi dan kerjasama. Uraian tersebut menunjukkan adanya perbedaan yang sangat signifikan antar prinsip pendidikan Finlandia dengan Indonesia.

3) Manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan di Indonesia

Kualitas pendidikan suatu bangsa mempunyai kaitan yang erat dengan kualitas tenaga pendidik atau guru. Di Indonesia begitu banyak sekolah tinggi keguruan dan universitas yang menyediakan tempat bagi para mahasiswa calon guru untuk mendalami keilmuan yang digelutinya. Mengacu pada UU SISDIKNAS pasal 39 ayat 2 Pendidik adalah tenaga profesional

yang bertugas sebagai perencana serta pelaksana kegiatan pembelajaran, penilai hasil pembelajaran, pelaksana pembimbingan serta pelatihan, dan melaksanakan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, terutama untuk pendidik pada pendidikan tinggi. Semua perguruan tinggi penghasil lulusan yang nantinya berprofesi guru diharapkan mampu memberikan berbagai pelatihan berkaitan kompetensi yang telah disebutkan. Selanjutnya pada pasal 40 ayat 2 poin a bahwa guru dituntut untuk menjadi seorang tenaga pendidik yang inovatif dan kreatif. Untuk menunjang tuntutan ini, hampir seluruh perguruan tinggi di Indonesia mewajibkan mahasiswa keguruannya untuk melaksanakan kegiatan lapangan, dalam hal ini melakukan simulasi pembelajaran. Selain itu kegiatan penelitian diwajibkan pada mahasiswa calon guru yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuannya dalam memecahkan masalah.

Guru di Indonesia harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yakni mampu mengartikulasi dan mencapai tujuan pendidikan, sehat jasmani serta rohani, dan mempunyai kompetensi sebagai agen pembelajaran (Blazar & Kraft, 2017), hal ini telah diatur oleh BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). PERMENDIKNAS No 16 tahun 2007 menjelaskan standar kompetensi tenaga pendidik mulai dari tingkatan PAUD hingga jenjang SMA sekurang-kurangnya adalah diploma 4 dalam bidangnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa proses Pendidikan hingga standar nasional seorang tenaga pendidik telah ditata secara rapi (2007).

Rekrutmen guru di sekolah, kepala sekolah memiliki peranan penting dalam perekrutannya. Guru yang baik dihasilkan dari proses rekrutmen yang baik. Permasalahan yang terjadi saat ini adalah banyaknya proses rekrutmen yang tidak sesuai aturan yang ada contohnya adalah banyaknya guru yang mengajar atau diterima disekolah yang tidak sesuai dengan bidang keilmuannya yang tentu saja akan memengaruhi kegiatan pendidikan itu sendiri. Hal ini tentunya bertentangan dengan peraturan yang mengatur standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang dijelaskan diatas.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 14 tahun 2018 mengatur tentang standar lembaga pendidikan dalam menerima siswa baru. Pasal 5-8 menyatakan bahwa tingkat TK harus memiliki kualifikasi usia sekurang-kurangnya 4 tahun, SD minimal 6 tahun tetapi menggunakan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional bagi calon peserta didik yang mempunyai kecerdasan istimewa/bakat istimewa serta kesiapan psikis diperbolehkan

mengikuti pendidikan di tingkat SD dengan usia 5 tahun 6 bulan, Jenjang smp kelas 7 berusia paling tinggi 15 tahun dan untuk jenjang SMA/SMK kelas 10 berusia paling tinggi 21 tahun. Peraturan ini pun menjadi acuan untuk setiap Lembaga Pendidikan untuk tidak memaksakan anak diusia tertentu mengenyam Pendidikan (Notoatmojo, 2011).

4) Manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan di Finlandia

Guru menjadi aktor pelaksana utama dalam menerapkan berbagai macam strategi, metode maupun regulasi yang telah ditentukan kurikulum nasional. Guru selalu menjadi panutan utama para peserta didik disekolah. Keseriusan Finlandia terhadap kualitas guru patut diteladani. Finlandia mampu menjadikan guru dinegaranya menjadi sosok yang sangat dihormati dikalangan masyarakat pada umumnya. Pencapaian ini tentunya tidak diperoleh dengan mudah tanpa melalui usaha-usaha yang cukup keras. Kualifikasi akademik bagi guru yang paling dasar adalah master, untuk menjadi guru mahasiswa akan melewati tiga tahap untuk memastikannya bisa menjadi guru profesional atau tidak. Tahap pertama, mahasiswa akan melaksanakan ujian kompetensi yang berkaitan dengan pemecahan masalah pendidikan. Tahap kedua, mahasiswa akan melakukan tahap wawancara serta melakukan sebuah simulasi pemecahan masalah. Kerjasama, komunikasi, serta kreativitas menjadi komponen utama dalam penilaian. Tahap ketiga, merupakan penentu apakah seorang bisa diterima menjadi guru atau tidak. Seorang mahasiswa akan dinilai dari semua aspek pendidikannya termasuk resume hasil uji pada tahap sebelumnya.

Pengembangan potensi profesi guru dilakukan melalui banyak metode salah satunya adalah mewajibkan para calon guru untuk melaksanakan pembelajaran ditingkat universitas melalui penelitian dan pelatihan pengembangan profesi. Kualifikasi yang diuraikan tersebut dapat dibayangkan betapa berkualitasnya para guru di Finlandia. Hasil penelitian yang berupa tesis dapat dijadikan dasar seorang guru dalam mengelola peserta didiknya (Goodill, 2017). Upaya guru untuk mengembangkan kemampuan selalu didukung penuh oleh pemerintahannya. Penelitian dan pelatihan ini dinilai mampu mengarahkan para guru untuk mampu mengenali kekurangan serta

menemukan solusi atas kekurangannya sendiri sehingga dapat memberikan pendidikan yang baik bagi peserta didiknya. Guru di Finlandia selalu diarahkan untuk memiliki kompetensi religious. Ini terbukti dengan konsep lain dari pendidikan guru yaitu melalui pendalaman iman yang dididik oleh pemimpin agamanya masing (Goodill, 2017). Pemilihan peserta didik tidak melalui kualifikasi yang sangat rumit.

5) Kurikulum Pendidikan Dasar di Indonesia dan Finlandia

Secara umum pemerintah Finlandia sangat bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan di negaranya. Peserta didik akan diberikan kenyamanan serta fasilitas pendukung dimulai dari Pre-primary sampai pada pendidikan tinggi. Kurikulum Pre-primary bertujuan untuk menyiapkan para calon peserta didik untuk mengenyam pendidikan di tingkat pendidikan dasar. Pada tahap ini pendidikan ditekankan pada usaha membangkitkan keterampilan anak melalui kegiatan belajar sambil bermain.

Finlandia menetapkan usia minimal peserta didik untuk memasuki pendidikan dasar adalah saat memasuki 7 tahun. Finlandia memiliki badan yang bernama The National Board of Education. Badan ini memiliki tugas untuk menyusun kurikulum inti secara nasional (Finnish National Agency For Education, 2018). Kurikulum di Finlandia disusun bertujuan untuk menghadirkan suatu standar isi dan berfungsi sebagai pemandu untuk lembaga pendidikan. Mata pelajaran yang diajarkan disesuaikan berdasarkan kebutuhan peserta didik yang dilakukan oleh pemerintah lokal, sekolah dan bahkan orang tua dapat ikut serta menyusun kurikulum pendidikan dan tujuannya.

Pendidikan di Finlandia menggunakan sistem kurikulum struktur tunggal. Pendidikan dasar ditempuh selama 9 tahun. Pendidikan 6 tahun pertama akan dididik oleh guru yang sama dalam melaksanakan pembelajaran (Anggoro, 2017). Sistem ini dilakukan dengan tujuan agar pembelajaran dapat difokuskan untuk mengasah keterampilan dan menggali potensi setiap peserta didik. Memasuki tiga tahun terakhir masa pembelajaran peserta didik akan dididik oleh guru matapelajaran untuk memperkenalkan ilmu pengetahuan dasar seperti matematika, sejarah, ilmu sosial, ilmu agama, Bahasa Inggris, Bahasa Italia, Bahasa Jerman dan ilmu pengetahuan dasar lainnya. Bahasa internasional selalu digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran yang bertujuan untuk membiasakan para siswa. Salah satu perhatian utama mereka yakni pembentukan karakter

peserta didik. Kurikulum di Indonesia juga memuat beberapa mata pelajaran utama yakni bahasa, pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, ilmu pengetahuan sosial, matematika, ilmu pengetahuan alam, pendidikan jasmani dan olah raga, keterampilan atau kejuruan, seni dan budaya, serta muatan lokal. Perbedaan yang sangat terlihat dari kedua kurikulum tersebut adalah bahwa Finlandia lebih banyak menekankan penguasaan bahasa dan sastra termasuk bahasa asing pada peserta didiknya.

Pemerintah Finlandia tidak menerapkan sistem tinggal kelas seperti yang ada di Indonesia. Kesetaraan dan menjaga mental para peserta didik menjadi alasan utama diberlakukannya sistem ini. Selain itu sistem penilaian terstruktur dalam setiap pertemuan, pembagian raport, dan pemberian beban tugas kepada peserta didik tidak termasuk dalam kurikulum Finlandia. Sebuah pencapaian pembelajaran akan diketahui melalui kegiatan matrikulasi yang diadakan sebelum memasuki perguruan tinggi. Siswa membuat sendiri kompetensi yang hendak dicapai dalam pembelajarannya dibantu orang tuanya. Kegiatan pembelajaran mengedepankan proses yang baik dan bertahap. Untuk meningkatkan kemampuan peserta didiknya dalam mengenali lingkungan sekitar, Pendidikan Finlandia selalu memberikan pemahaman terhadap teori melalui kegiatan pemecahan masalah terutama dalam ilmu sains (Kasihadi, 2016). Membandingkan sistem pendidikan Indonesia, tentu ini hal ini cukup berbeda. Di Indonesia terlihat begitu kental adanya rangking dan tidak naik kelas. Selain aspek tersebut, terlihat perbedaan yang paling mencolok dimana hari efektif sekolah di Finlandia sebanyak 190 hari/tahun sedangkan hari efektif sekolah di Indonesia mencapai 230 hari/tahun.

6) Sarana dan Prasarana Pendidikan Indonesia dan Finlandia

Kualitas fisik bangunan sekolah tidak bisa digambarkan sebagai kualitas pendidikan, Finlandia telah membuktikannya. Hal ini dikarenakan siswa tidak belajar dikelas-kelas, mereka boleh belajar disudut-sudut ruangan dengan mempelajari materi pelajaran apapun dalam arti penggunaan ruangan dilakukan secara bebas. Guru menyarankan siswa bermain jika siswa telah bosan atau penat dalam belajar dikelas. Hampir seluruhnya proses belajar mengajar di diadakan didalam kelas, siswa duduk manis dibangkungnya dan pendidik berceramah didepan kelas.

Fasilitas bimbingan konseling bagi siswa diwajibkan oleh pemerintah Finlandia. Perhatian luar biasa ditujukan kepada siswa yang memiliki gangguan psikologis dan lemah mental. Peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus di Indonesia sebagian besar tidak bersekolah di sekolah umum, melainkan bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB).

Siswa di Finlandia mendapatkan makan siang secara gratis dengan makanan yang bergizi tinggi dari pemerintah Finlandia hal ini karena kecerdasan siswa dipercaya dipengaruhi asupan gizi yang baik. Lembaga pendidikan di Indonesia mayoritas tidak memberikan fasilitas itu secara gratis. Bus sekolah antar jemput bagi siswa juga disediakan secara cuma-cuma oleh pemerintah Finlandia. Buku-buku teks pembelajaran juga sudah disediakan oleh sekolah ditunjang dengan jaringan internet yang memadai diperpustakaan sekolah, sedangkan yang terjadi di Indonesia walaupun dalam menjalankan kegiatan operasionalnya pemerintah menganggarkan sejumlah bantuan salah satunya dana BOS tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi seperti keterlambatan kedatangan buku-buku yang disediakan oleh pemerintah disekolah sehingga kegiatan belajar peserta didik terhambat. Perpustakaan di Indonesia mayoritas juga belum banyak yang dilengkapi fasilitas WIFI atau akses internet bahkan di daerah-daerah tertinggal juga belum bisa berfungsi dengan baik.

Generasi penerus bangsa di Finlandia sangat diperhatikan oleh pemerintahannya, berbeda dengan Indonesia (Kasihadi, 2016), di Indonesia sekolah-sekolah yang berkualitas baik hanya bisa dinikmati oleh anak-anak yang mempunyai orang tua berpenghasilan tinggi. Sekolah yang memiliki kualitas yang baik identik dengan biaya pendidikan yang tinggi, sehingga akses untuk menempuh pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dinilai cukup memberatkan para orang tua (Widodo, 2016). Akses mendapatkan pendidikan yang berkualitas inilah juga yang semakin menimbulkan kesenjangan diantara masyarakat.

7) Pendidikan Internasional

Negara finlandia sangat serius dalam masalah peningkatan mutu pendidikan. Hubungan internasional menjadi salah satu cara dalam mewujudkan tujuan tersebut. Peningkatan mutu melalui hubungan internasional dapat dilakukan melalui beberapa cara diantaranya pelatihan keterampilan bertaraf internasional dengan menghadirkan narasumber dari luar negeri, pertukaran pelajar antar negara, dan sebagainya. Negara Indonesia juga sudah melakukan hubungan internasional seperti yang dilakukan finlandia pada jenjang pendidikan tinggi, seyogyanya hal ini juga diberlakukan pada semua jenis pendidikan di Indonesia secara menyeluruh.

Negara Finlandia ikut aktif dalam membangun hubungan internasional mereka dalam dunia pendidikan dengan negara-negara eropa dimulai pada tahun 1995 melalui program internasionalisasi universitas-universitas di Finlandia. Pendidikan tinggi Finlandia memberikan kompetensi untuk bekerja di lingkungan operasi internasional. Pengalaman internasional dan koneksi staf lembaga pendidikan tinggi meningkatkan kualitas penelitian dan pendidikan dan mendukung internasionalisasi siswa. Institusi pendidikan tinggi menawarkan pendidikan berkualitas tinggi yang berfokus pada bidang keahlian mereka, yang diberikan dalam bahasa asing (Ministry of Education Finland, 2015). Selanjutnya, lembaga pendidikan tinggi secara aktif memanfaatkan peluang kerjasama internasional, khususnya, di negara-negara Uni Eropa dan Nordik. Pendidikan tinggi di indonesia banyak melakukan kerjasama internasional. Hubungan internasional yang dilakukan berbentuk pertukaran pelajar antar universitas, dan masih banyak lagi.

8) Sistem Inovasi Nasional Negara Finlandia

Kegiatan penelitian dan pengembangan terhadap sistem pendidikan dan inovasi yang muktakhir berdampak padapeningkatan kualitas pendidikan suatu negara. Salah satu sektor yang krusial dalam pengembangan sistem pendidikan finlandia adalah kegiatan peneliti. Pemerintah finlandia memberikan kebebasan bagi para peneliti untuk menemukan dan mengembangkan berbagai macam bentuk inovasi pendidikan. Ada beberapa elemen sentral yang dibutuhkan pemerintah finlandia dalam sistem inovasi teknologi negara finlandia yang dapat disederhanakan melalui gambar 1.



Gambar 2 Elemen Sistem Inovasi Nasional Finlandia.

Sistem inovasi nasional finlandia erat kaitannya dengan pendidikan dan pelatihan sebagai ilmu dasar seorang peneliti dalam melakukan riset. Seorang peneliti akan mempelajari kebutuhan apa saja yang sedang menjadi isu utama dalam permasalahan nasional. Upaya ini akan berdampak pada keputusan serta sasaran utama dalam melakukan riset. Ilmu pengetahuan dipandang sebagai konsep dasar untuk mengembangkan karya-karya yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Sistem terdiri dari input, proses, output, serta umpan balik. Kegiatan riset adalah salah satu usaha untuk mengubah kualitas input sehingga memberi dampak pada perubahan-perubahan dimasa yang akan datang (output).

Untuk menjamin mutu pelaksanaan riset inovasi nasional serta dapat memberikan dampak yang baik bagi perkembangan sistem pendidikan dinegaranya, Finlandia membutuhkan aktor strategis yang ikut andil dalam kegiatan ini diantaranya adalah industri, universitas, lembaga penelitian, dan pemerintah. Keterkaitan diantara setiap sektor penting ini telah memberikan dampak yang baik dalam pengembangan sistem pendidikan serta kemajuan negara Finlandia (Uotila, Harmaakorpi, & Hermans, 2013). Universitas dan lembaga penelitian lainya yang menyediakan tenaga riset sangat mebutuhkan andil pemerintah sebagai pemberi ijin maupun penentu kebijakan. Begitupula dengan industri yang dapat berperan sebagai lokasi riset maupun pelaksana kebijakan baru pemerintah sebagai hasil penemuan riset.

9) Resistansi Finlandia terhadap Global Educational Reform Movement

Globalisasi menyebabkan perkembangan dan membawa beragam substansi ke seluruh dunia. Global Educational Reform Movement (GERM) atau gerakan reformasi pendidikan merupakan fenomena global yang sampai saat ini masih terjadi di banyak negara. Pada beberapa dekade terakhir (P Sahlberg, 2009) menyatakan GERM mentransformasi sistem pendidikan di banyak negara. Secara singkat dapat dipetakan perbedaan nilai-nilai pendidikan GERM dan Finlandia pada Tabel 1

GERM	Finlandia
Competition	Cooperation and Collaboration
Freedom of Choice	Equality and Equity
Accountability	Trust and Responsibility

Dasar bagi kebijakan pendidikan berdasarkan nilai GERM yakni peningkatan mutu pendidikan dari segi output maupun dari segi pengelolaannya berpijak pada nilai-nilai kompetisi, masyarakat bebas menentukan pilihan sekolah yang akan dipilih, dan segala pelaksanaan yang berkaitan dengan pendidikan mulai dari guru, siswa, dan fasilitas harus sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Sisi yang lain, pengelolaan di negara Finlandia, pengembangan pendidikan berdasarkan pada nilai kesetaraan dan keadilan, kepercayaan dan tanggung jawab menjadi mekanisme pengelolaan pendidikan di Finlandia, dan nilai kerjasama dan kolaborasi ditekankan dalam pengelolaan pendidikan.

Penelitian mengenai pengaruh diselenggarakannya kebijakan pilihan sekolah serta kompetisi terhadap kualitas pembelajaran telah dilakukan oleh para peneliti di banyak negara. Rendahnya hubungan pilihan sekolah serta kompetisi terhadap kualitas pembelajaran ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Ladd dan Fiske (dalam Gagnidze and Maglakelidze 2017) di Selandia Baru. Hasil penelitian tersebut menunjukkan dampak negatif pilihan sekolah serta kompetisi terhadap kualitas pembelajaran. Artinya, kompetisi malah menurunkan kualitas pembelajaran. Penelitian yang dilakukan oleh Lauen dan Gaddis (2016) penentuan akuntabilitas melalui tes serta standarisasi memiliki dampak yang rendah terhadap prestasi siswa. Hasil penelitian tersebut menunjukkan, pertama bagi siswa, pemberlakuan tes serta standarisasi dianggap menurunkan kekritisannya berfikir. Kedua, bagi guru, akuntabilitas serta standarisasi

membuat anggapan bahwa guru tidak dapat kreatif serta independen dalam mengatur pembelajaran di kelas. Guru banyak yang menganggap tidak lagi dihargai karena harus diperiksa secara berkelanjutan. Guru maupun sekolah dipaksa menjalankan standar atau regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah akibat adanya sistem akuntabilitas.

Implikasi nilai kesetaraan dan keadilan adalah “education for all” artinya setiap warga negara berhak mendapatkan akses pendidikan yang bermutu tanpa melihat status sosial atau atribut yang menempel pada tiap-tiap orang (Sahlberg 2011). Sebaliknya, implikasi nilai yang didasarkan dalam GERM menciptakan kebijakan seperti privatisasi sekolah yang menimbulkan kesenjangan (Putra, 2015). Output kebijakan yang didasarkan pada nilai GERM tersebut bertentangan dengan nilai-nilai kesetaraan serta keadilan negara Finlandia. Implementasi kebijakan yang berdasar pada nilai GERM yakni akuntabilitas serta standarisasi mempunyai dampak yang tidak baik pada kreatifitas berpikir dan independensi pendidik dengan adanya sistem penilaian atau inspeksi yang dilakukan.

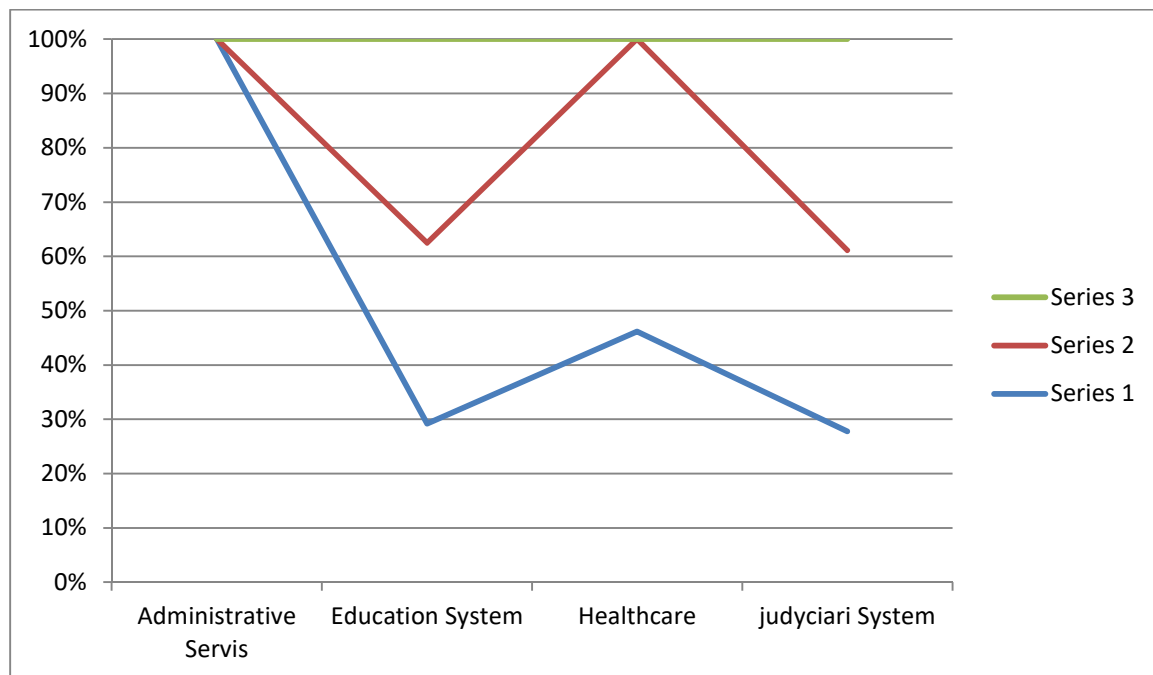
10) Perbandingan Hasil Tes OESD dan PISA Firlandia tahun 2022/2023 di Era Kontemporer

a. Hasil Tes OESD Firlandia

Kepercayaan dan kepuasan terhadap pelayanan publik Kepercayaan terhadap institusi publik dan kepuasan terhadap pelayanan publik merupakan tolok ukur penting kualitas tata kelola publik. Hal ini mencerminkan persepsi masyarakat terhadap kompetensi pemerintah dalam merancang dan melaksanakan kebijakan dan layanan, serta ekspektasi terhadap perilaku lembaga publik dan perwakilannya. Meskipun kepercayaan yang tinggi terhadap lembaga-lembaga publik bukan merupakan hasil penting dari pemerintahan yang demokratis, kepercayaan dan kepuasan terhadap layanan publik memfasilitasi tata kelola yang efektif, karena hal-hal tersebut berkorelasi dengan

tingginya tingkat kepatuhan terhadap kebijakan, partisipasi dalam kehidupan publik, dan kohesi sosial.

Finlandia mempunyai kinerja yang sangat baik dalam hal kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Diperkirakan 85% dan 82% merasa puas dengan sistem pendidikan dan peradilan, jauh di atas rata-rata negara-negara OECD. Lebih dari dua pertiga masyarakat Finlandia (70%) melaporkan kepuasan mereka terhadap sistem layanan kesehatan, yang berada sedikit di atas rata-rata OECD (68%).



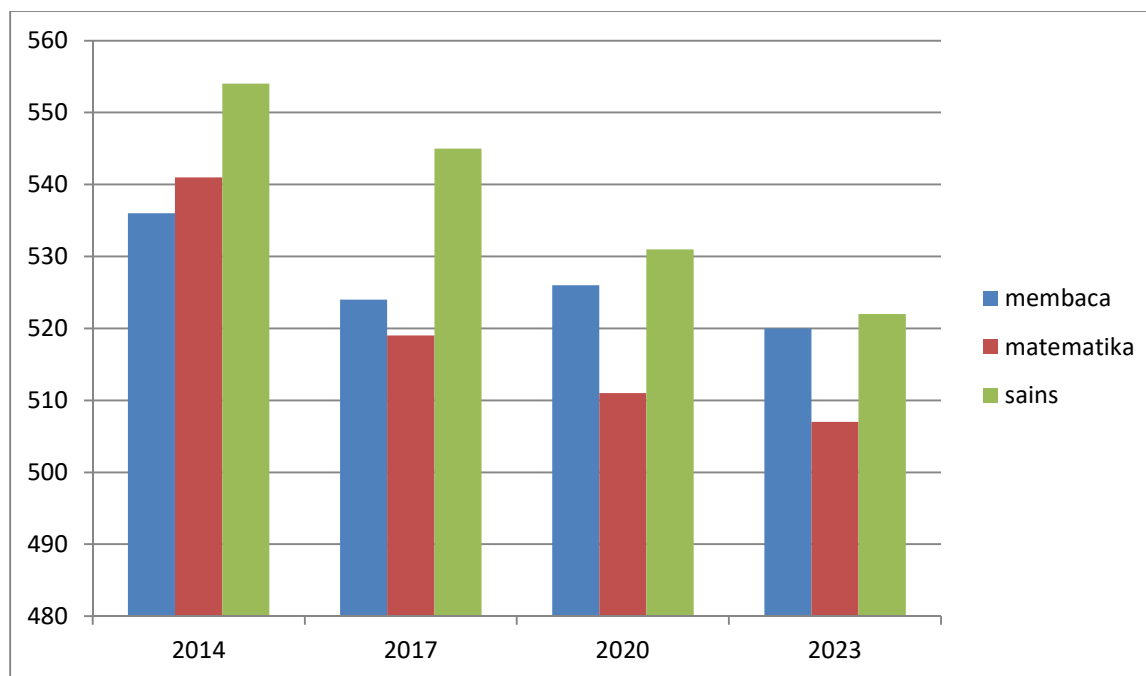
Mencapai hasil dengan praktik tata kelola yang baik Di era krisis yang beragam, pemerintah perlu mengadopsi praktik-praktik yang lebih maju untuk membangun kepercayaan terhadap lembaga-lembaga publik dan meningkatkan ketahanan demokrasi. Tindakan yang dilakukan termasuk membangun kekuatan demokrasi, seperti meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan; memperkuat kompetensi utama untuk menangani krisis, seperti penganggaran dan proses pengelolaan keuangan publik untuk mengatasi transisi ramah lingkungan dan digital; dan melindungi dari ancaman terhadap nilai-nilai demokrasi, seperti menjaga aturan integritas publik yang efektif dan mendorong penggunaan kecerdasan buatan secara etis.

Keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan membantu meningkatkan desain, implementasi, dan penerimaan publik terhadap kebijakan, infrastruktur, dan layanan. Indeks Tata Kelola Infrastruktur (IGI) OECD tentang partisipasi pemangku kepentingan memberikan gambaran kinerja negara-negara dalam mengembangkan panduan nasional untuk keterlibatan pemangku kepentingan, mendorong partisipasi efektif mereka, dan memastikan pengawasan pemangku kepentingan atas proyek infrastruktur.

Finlandia merupakan salah satu negara dengan kinerja tertinggi di IGI dalam hal partisipasi pemangku kepentingan. Skor IGI-nya adalah 0,66, dibandingkan dengan nilai rata-rata 0,52 di negara-negara OECD (1 adalah skor maksimum yang mungkin dicapai, yang berarti penerapan IGI sepenuhnya pada partisipasi pemangku kepentingan). Finlandia memiliki kinerja yang sangat baik dalam hal pengawasan pemangku kepentingan, dengan skor 0,28 dari nilai maksimum 0,33.

Proses pengelolaan penganggaran, seperti penganggaran ramah lingkungan, dapat membantu mengatasi krisis iklim dan mencapai tujuan lingkungan. Meskipun terdapat peningkatan pesat dalam jumlah negara yang menerapkan mekanisme penganggaran ramah lingkungan, hal ini dapat digunakan dengan lebih efektif. Mekanisme penganggaran ramah lingkungan mencakup pengaturan kelembagaan untuk menilai dampak lingkungan dari kebijakan anggaran dan fiskal, metode untuk mengevaluasi konsistensinya, mekanisme untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, dan kerangka tata kelola anggaran yang memungkinkan.

b. Hasil Tes PISA Finlandia



Dalam tes PISA 2023, siswa Finlandia memiliki prestasi jauh di atas rata-rata OECD dalam hal membaca, matematika, dan pengetahuan sains. Siswa Finlandia memperoleh 520 poin dalam membaca, 507 poin dalam matematika, dan 522 poin dalam sains.

Program Penilaian Siswa Internasional (PISA) OECD adalah studi di seluruh dunia yang mengevaluasi sistem pendidikan di negara-negara tertentu dengan menilai kinerja siswa dalam membaca, matematika, dan sains. Hal ini dilakukan pertama kali pada tahun 2000 dan kemudian diulang setiap tiga tahun. Lebih dari setengah juta anak berusia 15 tahun dari 79 negara dan perekonomian mengikuti tes PISA pada tahun 2023.

Keberhasilan PISA Finlandia Finlandia termasuk negara dengan peringkat teratas dalam semua tes PISA sejak tahun 2000, namun dalam beberapa tahun terakhir negara Nordik tersebut menunjukkan penurunan kinerja. Tren penurunan skor rata-rata Finlandia berlanjut pada tahun 2023 dengan penurunan sebesar 4 poin dari PISA 2020. Meskipun peringkat literasi matematika tetap pada level sebelumnya, kinerja literasi membaca dan sains menurun. Sementara itu, Estonia telah mengungguli Finlandia dalam peringkat PISA sebagai pemimpin Eropa .

Kesenjangan gender yang besar dalam keterampilan membaca Siswa Finlandia terus menunjukkan kinerja yang baik dalam literasi membaca, namun perbedaan keterampilan membaca

antara anak perempuan dan anak laki-laki merupakan salah satu yang terluas di negara-negara peserta. Pada PISA 2023, selisih kesukaan terhadap anak perempuan adalah 51 poin, dibandingkan dengan rata-rata 30 poin di negara-negara OECD. Tren lain yang mengkhawatirkan adalah meningkatnya pengaruh latar belakang sosio-ekonomi terhadap hasil pembelajaran. Secara khusus, jumlah pembaca dengan kinerja buruk di kelompok sosio-ekonomi terendah telah meningkat, sementara hasil pada kelompok sosio-ekonomi tertinggi tetap sama.

11) Perbandingan HDI Negara Firlandia dan Negara Norwegia

Peringkat		Negara	IPM	
Data 2018 (Laporan 2019)	Perubahan Dari Tahun Sebelumnya		Data 2018 (Laporan 2019)	Perubahan Dari Tahun Sebelumnya
Pembangunan Manusia Sangat Tinggi				
1	-	Norwegia	0.954	0.001
12	-	Firlandia	0.925	0.001

IPM Negara Firlandia dan Norwegia

Peringkat	Negara	IPM	
		DATA 2018	Perubahan Dibandingkan Dengan Data 2017
Pembangunan Manusia Sangat Tinggi			
1	Norwegia	0.954	+0.001
9	Firlandia	0.925	+0.001

Penutup

Kesimpulan yang dapat diambil yakni nilai-nilai kesetaraan dan keadilan, nilai-nilai kepercayaan dan tanggungjawab, dan nilai-nilai kerjasama dan kolaborasi dikembangkan dalam pengelolaan pendidikan di Finlandia. Hal ini agaknya bertentangan dengan pelaksanaan pendidikan yang ada di Indonesia yakni yang mengutamakan persaingan, adanya tinggal kelas dalam sistem pendidikan nya. Negara Finlandia tidak menerapkan sistem tinggal kelas perangkan dengan jam pelajaran 30 jam perminggu, mengedepankan metode problem solving, tidak membebani peserta didik dengan banyak tugas dan kualifikasi guru minimal S2 dengan kualifikasi peserta didik mengikuti pendidikan dasar minimal berusia 7 tahun, sedangkan

Indonesia menerapkan sistem tinggal kelas dan perangkan, beban belajar setiap minggu 40 jam/minggu, pembelajaran lebih banyak didalam kelas, pemberian hampir menjadi agenda rutin setiap tatap muka, dan kualifikasi guru minimal D4 dengan Kualifikasi peserta didik memasuki pendidikan dasar minimal 6 tahun (5,5 tahun disertai rekomendasi tertulis dari psikolog profesional). Berdasarkan kesimpulan yang dijabarkan sebelumnya, maka dirumuskan saran yakni pemerintah hendaknya merumuskan kebijakan yang dapat sistem pendidikan negara lain yang telah terbukti berhasil dalam peningkatan pendidikan di negaranya, untuk peneliti selanjutnya agar merancang sebuah analisis komparatif sistem pendidikan yang ada pada negara Indonesia, negara berkembang, dan negara maju guna mencari formula sistem pendidikan yang paling tepat dengan karakteristik serta tantangan dan peluang pendidikan di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Anggoro, S. (2017). Keberhasilan Pendidikan Finlandia.
- Blazar, D., & Kraft, M. (2017). Teacher and Teaching Effects on Students' Attitudes and Behaviors. *Educational Evaluation and Policy Analysis*, 39(1), 146–170. <https://doi.org/DOI:10.3102/0162373716670260>
- Charron, N., Ph, D., Givens, T., Luedtke, A., Arregui, J., Creighton, M., ... Connell, K. O. (2013). Human Development Report 2015 Work for Human Development. *Public Health*, 27(6), 1–8. <https://doi.org/10.1177/0956247815583253>
- Finland, M. of E. (2015). Ministry of Education 2015.
- Finnish National Agency For Education. (2018). Education System: Equal Opportunities to High Quality Education.
- Gagnidze, A., & Maglakelidze, S. (2017). Competition on the Georgia Education Marketplace. *International Education Studies*, 10(6), 10–22.
- Goodill, C. . (2017). An Analysis of the Educational System In Finland and the United States: A Case Study.
- Kasihadi, R. . (2016). Optimalisasi Prestasi Peserta Didik Melalui Sistem Pendidikan yang Humanis: Suatu Perbandingan dengan Negara Maju. *Jurnal Widyatama*, 20(2), 145–151.
- Lauen, D, L., & Gaddis, S. . (2016). Accountability Pressure, Academic Standards, and Educational Triage. *Educational Evaluation and Policy Analysis*, 38(1), 127–147.
- Liputan6.Com. (2014). Pendidikan di Finlandia Maju Berkat Ki Hajar Dewantara.

- Notoatmojo, S. (2011). Pengembangan Sumber Daya Manusia. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 2(1), 124.
- OECD. (2015). *Country Note Results of PISA 2015: Indonesia*.
- Parker, L., & Raihani, R. (2011). Democratizing Indonesia through Education ? Community Participation in Islamic Schooling. *Educational Management Administration & Leadership*, 39(6), 712–732. <https://doi.org/10.1177/1741143211416389>
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 14 Tahun 2018 Tentang PPDB Pada TK, SD, SMP, SMA, SMK, Atau Bentuk Lain yang Sederajat. (2018). Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.16 Tahun 2007 Tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. (2007). Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Pfeffer, F. T. (2015). Equality and Quality in Education a Comparative Study of 19 Countries. *Social Science Research*, 51(1), 350–368. <https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2014.09.004>
- Putra, K. . (2015). Resistansi Finlandia terhadap Global Educational Reform. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, 4(1), 1393–1421.
- Reynolds, D., Caldwell, B. J., Cruz, R. M., Miao, Z., Murillo, J., Mugendawala, H., ... Ramon, M. R. R. (2015). Comparative educational research. In *The Routledge International Handbook of Educational Effectiveness and Improvement: Research, Policy, and Practice*. <https://doi.org/10.4324/9781315679488>
- Sahlberg, P. (2009). Education Reform For Rising Economic Competitiveness. *International Organizations Research Journal*, 4(1), 15–33.
- Sahlberg, Pasi. (2011). Paradoxes of Educational Improvement: The Finnish Experience. *Scottish Educational Review*, 43(1), 3–23.
- Sarica, G. N., & Cavus, N. (2009). New trends in 21st Century English learning. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 1(1), 439–445. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2009.01.079>
- Ulfatin, N. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan: Teori dan Aplikasinya*. Malang: Media Nusa Creative.